

**ASPEK-ASPEK POLITIK, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA DALAM
PENDIDIKAN : PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK DI
INDONESIA
(Sudi Dokumentasi)**

Dikson Silitonga
Institut Bisnis Nusantara
Jl.D.I.Panjaitan Kav 24 Jakarta 13340
(021) 8564932

ABSTRACT

The advance of education in a country is determined by many factors, such as ; politic, economy, culture and society of that nation. Education and politic are two essential elements for political society in every nations. A nation of which the educational politic is bad, it will perform a bad educational quality, too. On the other hand, a nation that has good educational politic, the performance will be good. Both of them have a role to form the social character in a nation. Meanwhile, in democracy and decentralization in Indonesia, the politic (executive and legislative) has a great influence. Therefore, politic and authority (power) can be a media for public expectation for good educational system. Hence, we need serious action to create educational politic situation which is good and solid by the executive and legislative to achieve the education which has good quality and spreads in districts in Indonesia.

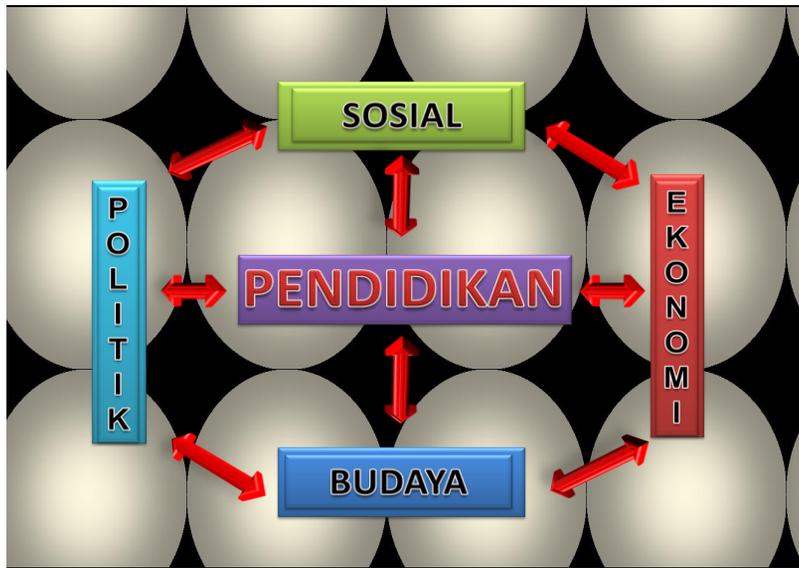
Key words : Education, Politic, Authority, Key of Success, Democratization, Decentralization, Educational Politic Condition.

A. Latar Belakang

Dunia pendidikan tidak mungkin lepas dari politik dan kekuasaan. Bahkan, politik dan kekuasaan di suatu negara memegang kunci keberhasilan pendidikan. Menurut **Paulo Freire** masalah pendidikan tidak mungkin dilepaskan dari masalah sosio-politik, karena bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pengembangan pendidikan¹. Maka dalam konteks demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia peran politik (eksekutif dan legislatif) begitu besar. Sehingga, ranah politik dan kekuasaan mampu menjadi wahana bagi espektasi publik akan sebuah sistem pendidikan yang mencerahkan.

¹ Paulo Freire, *The Political of Education*, p.12

Dikson Silitonga : "Aspek-Aspek Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya....." 62



Gambar 1.1. Hubungan politik, ekonomi, sosial dan budaya dengan pendidikan

Paulo Freire yang oleh banyak kalangan sering disebut sebagai salah satu tokoh liberalisme pendidikan, telah mengarang buku yang diberi judul *The Politic of Education*. Dalam buku ini, meski tidak diuraikan di dalam chapter yang tersendiri, secara implisit terdeskripsi betapa pentingnya politik pendidikan untuk menentukan kinerja pendidikan suatu negara.

Dalam buku tersebut dilukiskan persoalan menyangkut pemberantasan buta huruf, pemeranan guru, reformasi agraria, pemeranan pekerja sosial, pemberantasan buta politik, humanisasi pendidikan, peran gereja, dan sebagainya yang tidak terlepas dari politik pendidikan.

Negara yang politik pendidikannya buruk, kinerja pendidikannya pun juga buruk. Sebaliknya, negara yang politik pendidikannya bagus, kinerja pendidikannya pun juga bagus.

Pertanyaannya kini, bagaimanakah politik pendidikan di negara kita? Inilah pertanyaan yang cukup menggelitik bagi penulis untuk diklarifikasi. Kalau kita enggan menyatakan politik pendidikan kita buruk, setidaknya-tidaknya kita dapat menyatakan bahwa politik pendidikan di negara kita belum sepenuhnya positif. Menurut **Soedijarto**, kondisi ini terjadi dikarenakan tidak konsistennya pola pikir

Dikson Silitonga : "*Aspek-Aspek Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya.....*" 63

sementara pemimpin politik dan pakar ilmu politik dan hukum dengan cita-cita kenegaraan yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, dan ini merupakan akar dari kemelut politik dan sukarnya membangun sistem politik stabil.² Jika dikaitkan dengan pendapat **Briefly** dalam **Robert A. Dahl**, pemimpin politik dalam pemerintahan demokrasi modern adalah (1) *elected official*, (2) *Free, fair, and frequent elections*, (3) *freedom of expression*, (4) *access to alternative sources of information*,³ (5) *associational autonomy*, and (6) *inclusive citizenship*. Indikasinya ketidak konsistennya tidak sulit; komitmen yang rendah, besarnya anggaran yang tidak memadai, manajemen pendidikan yang lemah, dan sebagainya. Untuk itu, menurut **Wardiman** dalam **Soedijarto**, diperlukan *Political will* kita yang lebih kuat lagi untuk menempatkan pendidikan di atas kepentingan kelompok atau golongan.⁴ Terkait dengan pertanyaan tersebut, maka penulis memilih judul penelitian studi dokumen ini: "*Pendidikan Dalam Perspektif Politik*".

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian studi dokumen ini adalah :

- 1) UUD 1945, Politik Demokrasi dan Eksploitasi Kekuasaan
- 2) Realitas Politik Pendidikan di Indonesia
- 3) Otonomi Daerah dan Pendidikan Nasional
- 4) Komitmen Politik Untuk Pendidikan

C. Landasan Teoritis

Menurut **Juwono Sudarsono**, makna pendidikan yang hakiki merujuk pada sebuah kondisi yang mampu memberikan ruang kesadaran kepada peserta didik untuk mengembangkan jati dirinya melalui sebuah proses yang menyenangkan, terbuka, dan tidak terbelenggu dalam suasana monoton, kaku dan

² Soedijarto, Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita, Penerbit: PT. Kompas Media Nusantara, 2008, hal 12

³ Briefly, dalam Robert A. Dahl, *On Democracy*, Penerbit: Yale University Press, New Haven & London, 1998.p.

⁴ Wardiman Djojonegoro, dalam Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Penerbit: PT. Kompas Media Nusantara, 2008, hal XXXIII

Dikson Silitonga : "*Aspek-Aspek Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya.....*" 64

menegangkan.⁵ Artinya, pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran terhadap manusia secara terus menerus, agar manusia itu menjadi pribadi kamil (sempurna) lahir dan batin.

Pendapat di atas sesuai dengan **Pasal 1 bab 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003** tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengemukakan bahwa, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, ahlak mulia, serta ketrampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara⁶. Rumusan ini secara tersurat (*eksplisit*) berorientasi masa depan (*future oriented*), dan secara tersirat (implisit) berorientasi pada perubahan tingkah – laku (*behavioral change*) manusia peserta didik.

Menurut **Soedijarto**, dengan pendidikan nasional yang memenuhi standar minimal *quality assurance* diharapkan berbagai infrastruktur politik (lembaga dan budaya politik yang demokratis), infrastruktur ekonomi (infrastruktur fisik, infrastruktur teknologi, infrastruktur sumber daya manusia, dan infrastruktur permodalan), infrastruktur sosial budaya, dan infrastruktur pertahanan keamanan nasional dapat didukung oleh warga nergara Indonesia yang cerdas dan berkarakter.⁷

Melalui pengajaran (*Teaching*) pendidik menyampaikan pengetahuan dan informasi fungsional kepada pesera didik yang akan di gunakan untuk meningkatkan mutu dan taraf hidupnya melalui latihan (*training*) pendidik menyampaikan ketrampilan yang relevan kepada peserta didik yang akan di gunakannya sebagai bekal untuk mencari nafkah sehari-hari. Melalui pendidikan kita memberdayakan (*empowering enabling*) peserta didik untuk menghadapi tantangan dan peluang masa depan. Jika dibandingkan dengan seksama

⁵ Juwono Sudarsono, dalam Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Penerbit: PT. Kompas Media Nusantara, 2008, hal XX

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, hal 1

⁷ Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Penerbit: PT. Kompas Media Nusantara, 2008, hal 16

Dikson Silitonga : "Aspek-Aspek Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya....." 65

dapatlah dikatakan bahwa pekerjaan yang paling mudah adalah didalam proses pendidikan adalah pengajaran dan yang paling sulit adalah bimbingan.

Selanjutnya, apa itu politik pendidikan? Politik pendidikan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuasaan untuk mendesakkan kebijakan pendidikan, dapat bersifat keras dan lunak. Politik pendidikan dikategorikan keras apabila melibatkan kekuatan (fisik) untuk mendesakkan implementasi kebijakan tertentu. Sebaliknya, politik pendidikan lunak menekankan implementasi kekuasaan secara halus (**subtle**) lewat strategi taktis.

Berdasarkan pengertian pendidikan dan politik pendidikan di atas dapat disimpulkan seperti dikemukakan dalam pendahuluan bahwa, "*Negara yang politik pendidikannya buruk, kinerja pendidikannya pun juga buruk. Sebaliknya, negara yang politik pendidikannya bagus, kinerja pendidikannya pun juga bagus*".

Dalam ungkapan **Abernethy** dan **Coombe** disebutkan, pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam system sosial politik disetiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya bahu-membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat disuatu Negara. Lebih dari itu, keduanya satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-Lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat dinegara tersebut. Begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses politik disuatu Negara membawa dampak besar pada karakteristik pendidikan di Negara tersebut.

D. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (*explanatory research*). Menurut Sugiyono⁸, permasalahan *explanatory research* merupakan suatu permasalahan yang berkenaan dengan variabel itu sendiri. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah : Studi Pustaka, yaitu metode yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan

⁸ Sugiyono, 1999, "**Metode Penelitian Administrasi**", Penerbit : Alfabeta, Bandung, Indonesia, 1999, hal 25

Dikson Silitonga : "*Aspek-Aspek Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya.....*" 66

teoritis yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Pendekatan ini ditempuh dengan membaca literatur, jurnal penelitian, majalah atau media lain yang terkait dengan penelitian.

Dalam penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah berupa data sekunder, karena data telah dimiliki oleh beberapa pihak atau telah dipublikasikan. Adapun data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif.

E. Analisis dan Pembahasan

1. UUD 1945, Politik Demokrasi dan Eksploitasi Kekuasaan

Salah satu faktor penyebab terpuruknya kehidupan politik dan ekonomi adalah diabaikannya pendidikan nasional sebagai wahana untuk menunjang transformasi budaya menuju tegaknya negara kebangsaan yang berperadaban tinggi. Hal ini menurut **Wardiman** sudah disadari sepenuhnya oleh para pendiri bangsa (*the Founding Fathers of Republic*) sejak awal, sehingga dalam Pembukaan UUD 1945 tercantum salah satu cita-cita kemerdekaan : "... untuk mencerdaskan kehidupan bangsa".⁹ Selanjutnya, tentang pendidikan diatur dalam Pasal 31 UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 UUD 1945 telah mengamanatkan kepada penyelenggara negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan suatu sistem pendidikan nasional. Artinya, pemerintahlah yang secara *legitimate* mewakili kepentingan seluruh masyarakat bangsa, mendapat wewenang untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan. Namun, 56 tahun setelah Indonesia merdeka (2011) masih terus terjadi krisis multidimensi dan bahkan diperkirakan 10 tahun kemudian pun Indonesia belum bangkit dari krisis multidimensi tersebut. Kenyataan fenomenal ini menurut **Soedijarto** merupakan indikasi bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional, yang oleh para pendiri Republik dirancang untuk mencerdaskan bangsa, yaitu kehidupan bangsa Indonesia yang maju, demokratis, makmur,

⁹ Wardiman Djojonegoro, dalam Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Penerbit: PT. Kompas Media Nusantara, 2008, hal XXXIII

Dikson Silitonga : "*Aspek-Aspek Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya.....*" 67

sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila masih jauh dari berhasil.¹⁰ *Penyebabnya, para elit politik belum sepenuhnya memahami hakikat cita-cita negara kebangsaan ini sebagai suatu sistem dan budaya politik sesuai tingkat perkembangan peradaban dan kebudayaan nasional.*

Secara formal peranan pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan telah dijalankan. Namun menurut **Soedijarto**, pendidikan yang dilaksanakan sampai sekarang belum dapat berfungsi sebagai wahana transformasi budaya, karena proses pendidikan yang berlangsung di lembaga pendidikan sekolah dari SD sampai perguruan tinggi belum merupakan proses pembudayaan berbagai kemampuan, nilai dan sikap warga masyarakat negara kebangsaan yang merdeka, demokratis dan berkeadilan sosial.¹¹ Gejala ini antara lain seperti diungkapkan di atas, adalah **kasus unjuk rasa ribuan guru** yang menuntut kenaikan anggaran pendidikan, kesejahteraan, dan status kepegawaian di Jakarta, Tangerang, Yogyakarta dan wilayah lain beberapa waktu lalu.

Berbagai unjuk rasa itu merupakan indikasi, kesadaran tentang keharusan pemerintah melaksanakan ketentuan konstitusi tentang anggaran pendidikan mulai menyebar ke kalangan guru. Tampaknya para guru merasa ikut bertanggung jawab untuk menuntut pemerintah agar memenuhi ketentuan anggaran pendidikan. Di zaman pascareformasi, kesadaran dan tanggung jawab itu terekspresikan dalam unjuk rasa guru yang kian lazim terjadi.

Meski demikian, **kasus unjuk rasa guru-guru** dengan mogok mengajar adalah kasus politik pendidikan yang unik. Dengan mogok guna mendesak tuntutan, **"para guru mengeksploitasi potensi kekuasaan"** dalam kolektivitas mereka. Ketika disalurkan lewat politik pendidikan yang keras, potensi kekuasaan itu mewujud dalam kekuatan massa yang secara nyata menentukan nasib anak didik, masyarakat, bahkan hitam/putihnya kewibawaan pemerintah.

¹⁰ Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Penerbit: PT. Kompas Media Nusantara, 2008, hal XLVI

¹¹ Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Penerbit: PT. Kompas Media Nusantara, 2008 hal 14-15

Dikson Silitonga : "Aspek-Aspek Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya....." 68

Kenyataan di atas memberi gambaran kepada kita bahwa pelaksanaan politik demokrasi di Indonesia belum mantap, hal ini disebabkan belum membudayanya nilai-nilai politik demokrasi dalam masyarakat. Terkait dengan kehidupan politik **Soedijarto** mengemukakan bahwa, "mantapnya kehidupan politik maupun ekonomi suatu bangsa ditentukan bukan semata-mata oleh ada tidaknya lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga ekonomi, dan lembaga kebudayaan lainnya, melainkan oleh tingkat terinternalisasinya nilai-nilai budaya politik demokrasi suatu masyarakat bangsa.¹² Pendapat ini sejalan dengan pendapat **Gabriel A. Almond** dan **Sydney Verba** yang mengemukakan bahwa, masalah utama pelaksanaan demokrasi politik adalah masalah sikap dan perasaan, bukan masalah ideologi, yang intinya adalah masalah adanya budaya politik yang serasi dengan politik yang dianutnya.¹³

Selanjutnya secara rinci **Robert A. Dahl** melalui hasil penelitiannya mengemukakan, "terlaksananya sistem politik demokrasi antara lain ditentukan oleh ada tidaknya '*belief in democracy*', '*weak cultural pluralism*', serta adanya '*modern society and economy*'.¹⁴ Dan menanggapi pentingnya demokrasi sebagai sistem politik dalam berbagai aspek termasuk pendidikan, **Seymour Marten Lipset** memberi pernyataan : "*my commitment to democracy as a political system does not rest solely on the belief that free debate and institutionalized conflict among opposing interest groups are the best way for society to progress intellectually as well as materially but also on the assumption that only a politically democratic society can reduce the pressures endemic in social systems to increase the punitive and discriminatory aspects of stratification*".¹⁵

Terkait dengan hubungan politik demokrasi dengan pendidikan, **Seymour Marten Lipset** menyimpulkan : "*the relationship between education and democracy is worth more extensive treatment since an entire philosophy of*

¹² Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Penerbit: PT. Kompas Media Nusantara, 2008, hal 92

¹³ Gabriel A. Almond and Sydney Verba, *Civil, Culture : Political Attitude and Democracy in Five Nation*, Boston Little Brown and Co., 1965, hal 4.

¹⁴ Robert A. Dahl, *On Democracy*, Penerbit: Yale University Press, New Haven & London, 1998.

¹⁵ Seymour Marten Lipset, *Political Man : The Social Bases of Politics*, Garden City, New York : Anchor Books Doubleday & Company Inc., 1960, p.XXII

Dikson Silitonga : "Aspek-Aspek Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya....." 69

government has seen increased education as the basic requirement of democracy".¹⁶ Menurut **Azyumardi Azra**, "pendidikan demokrasi singkatnya secara substansi menyangkut sosialisasi, diseminasi dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya dan praktek demokrasi melalui pendidikan."¹⁷

2. Realitas Politik Pendidikan di Indonesia

Untuk melihat realitas politik pendidikan di Indonesia, kita bisa mengukurnya dari kebijakan dan praktik pendidikan yang ada. Dalam Bab II Renstra Kemendiknas Tahun 2010-2014 disebutkan bahwa : "Kondisi politik, pertahanan dan keamanan yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah (1) *ketidakstabilan politik serta pertahanan dan keamanan yang mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara*, (2) *ketidaksielarasan peraturan perundangan yang berdampak pada penyelenggaraan pendidikan*, (3) *kebutuhan pendidikan politik untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi*, (4) *implementasi otonomi daerah yang mendorong kemandirian dan berkembangnya kearifan lokal*, (5) *terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam implementasi otonomi daerah*, (6) *keterlambatan penerbitan turunan peraturan perundangan yang berdampak pada bidang pendidikan*, (7) *ancaman disintegrasi bangsa akibat dari ketidakdewasaan dalam berdemokrasi*, (8) *ideologi negara sebagai pemersatu bangsa dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan*, dan (9) *komitmen pemenuhan pendanaan pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (4)*".¹⁸

Pertanyaannya adalah kebijakan pendidikan yang bagaimana yang harus ditempuh pemerintah untuk menjawab kondisi di atas? Pemerintah melalui Kemendiknas telah menetapkan Renstra pendidikan tahun 2010 - 2014 dengan tiga sasaran pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai, yaitu meningkatnya perluasan dan pemerataan pendidikan, meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan; dan meningkatnya tata pemerintahan (*governance*),

¹⁶ Ibid, p.39

¹⁷ Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Jakarta :Kompas, 2002, hal 154

¹⁸ Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 Bab II, hal 13
Dikson Silitonga : "Aspek-Aspek Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya....." 70

akuntabilitas, dan pencitraan publik. Karena itu, kebijakan pendidikan nasional harus mampu menghadirkan pemerataan pendidikan yang bermutu pada setiap sisinya. Dalam konteks outcome, pendidikan nasional harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan intelektual dan akhlak mulia secara seimbang.

Pembangunan pendidikan hendaknya dapat membangun manusia Indonesia seutuhnya sebagai subyek yang bermutu. Membangun manusia seutuhnya berarti mengembangkan seluruh potensi manusia melalui keseimbangan olah hati, olah pikir, olah rasa, olah raga, dan olah jiwa yang dilakukan seiring dengan pembangunan peradaban bangsa.

Pemerintah Indonesia memang telah terus-menerus memberikan perhatian yang besar pada pembangunan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan negara, yaitu mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang pada akhirnya akan sangat mempengaruhi kesejahteraan umum dan pelaksanaan ketertiban dunia serta berkompetisi dalam perbatasan global. Namun dalam realitasnya, kita menyaksikan ternyata kebijakan dan praktik pendidikan kita masih jauh panggang dari api. Hal ini bisa kita lihat mulai dari kemampuan mengalokasikan anggaran pendidikan, pemerataan akses dan angka partisipasi pendidikan masyarakat, kualifikasi dan mutu profesionalisme serta kesejahteraan guru, dan daya saing lulusan pendidikan di dunia kerja,

Terkait dengan politisasi pendidikan, **Jacques Delors** mengemukakan, politisasi pendidikan di banyak negara lebih jelas terlihat dari penggunaan dana (anggaran) pemerintah dan tekanan pertanggungjawaban (**akuntabilities**) penggunaan sumber daya yang tersedia untuk pendidikan.¹⁹ Dilihat dari anggaran kita semua tentu paham bahwa sampai sekarang ini besarnya anggaran pendidikan di negara kita tidak saja terjelek di Asia Tenggara, di Asia atau di kawasan terbatas lainnya; namun anggaran pendidikan kita ternyata termasuk terjelek di dunia.

¹⁹ Jacques Delors, Diterjemahkan W.P Napitupulu, *Pendidikan Untuk Abad XXI*, UNESCO Publishing, 1998, hal 24

Dikson Silitonga : "Aspek-Aspek Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya....." 71

Kalau kita mengacu publikasi badan dunia UNDP, misalnya; anggaran pendidikan kita lebih jelek tidak saja dari negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, Jerman dan Jepang; tetapi juga dari negara berkembang lainnya, seperti Malaysia, Thailand, Brasilia, Meksiko, dan Nigeria; bahkan ternyata juga lebih jelek dari negara-negara terbelakang seperti Bangladesh, Burundi, Ethiopia, Nepal, Congo, dan sebagainya. Angka rata-rata anggaran pendidikan di negara maju mencapai 5,1 persen terhadap GNP, di negara berkembang 3,8 persen dan negara terbelakang 3,5 persen. Sementara itu, negara kita hanya mengalokasikan dana kurang dua persen terhadap GNP.

Kita semua menyadari, bahwa untuk memajukan dunia pendidikan nasional dan meningkatkan kualitas SDM bangsa sesuai dengan yang dicita-citakan, maka pemenuhan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD adalah menjadi keniscayaan. Komitmen serius untuk terus meningkatkan anggaran pendidikan adalah persoalan mendesak, jika kita betul-betul serius ingin mencerdaskan kehidupan bangsa ini melalui pendidikan yang bermutu. Karena, UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) telah mengamanahkan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.²⁰ Bahkan, UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 49 ayat (1) menegaskan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).²¹

Selama ini Pemerintah bersama-sama dengan DPR-RI telah sepakat untuk menempatkan alokasi anggaran pendidikan menjadi prioritas tertinggi dalam penetapan APBN setiap tahun. Hal ini dapat dilihat pada kenaikan anggaran di Departemen Pendidikan dan Agama yang melonjak sangat tinggi pada tiga tahun terakhir. Upaya untuk memenuhi anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen dari dana APBN, diluar gaji dan pendidikan kedinasan, telah diupayakan untuk direalisasikan secara bertahap sampai tahun 2009. Selanjutnya sejak tahun anggaran 2009 amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas (sesuai dengan

²⁰ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, hal 15

keputusan Mahkamah Konstitusi No. 13 Tahun 2008) telah dipenuhi oleh pemerintah dengan menyediakan anggaran pendidikan 20% dari APBN. Total anggaran tahun 2009 mencapai Rp207 triliun atau 20% dari APBN sebesar Rp1.037 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 4% dan tingkat inflasi 3,5%. Berikutnya APBN tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp1.038 triliun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5% dan tingkat inflasi 5%. Pada tahun 2014 diperkirakan APBN akan mencapai Rp1.583 triliun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 7,2% dan tingkat inflasi 4%.²²

Dalam masalah partisipasi pendidikan juga begitu halnya. Anak usia SD, SMP, SMA dan SMK di Jepang, Republik Korea, Taiwan dan Singapura, hampir seluruhnya sudah masuk sekolah. Mereka tidak saja sekadar disuruh bersekolah tetapi juga diberi kesempatan dan fasilitas belajar secara memadai. Bagaimana di Indonesia? Sampai saat ini masih banyak anak usia SD, SMP, SMA dan SMK yang tidak bersekolah. Secara definitif angkanya sangat tinggi, mencapai jutaan anak. Angka partisipasi pendidikan untuk tingkat SD, SMP, SMA dan SMK ternyata masih rendah. Ditambah lagi dengan tingginya angka putus sekolah dan buta aksara.

Terkait dengan rendahnya partisipasi pendidikan, data Kemendiknas tahun 2009 dalam Renstranya Tahun 2010-2014 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD sebesar 3 %, APK SD/MI/SDLB/Paket A diperkirakan mencapai 98,00% %, APK SMA/MA/SMK/SMALB/ Paket C hanya sebesar 29,2%%, dan APK pendidikan tinggi diperkirakan menjadi 18,50%.²³ Adapun mengenai tingginya angka putus sekolah, tercatat bahwa angka putus sekolah tingkat SD sebanyak 2,97%, SMP 2,42%, SMA 3,06%, dan Perguruan Tinggi 5,9%. Sementara, tingginya jumlah warga negara yang masih buta huruf, tercatat bahwa dari total penduduk sebanyak 211.063.000, yang masih buta huruf pada usia 15 tahun ke atas, berjumlah 15.4 juta, dengan perbandingan laki-laki sebesar 5,8% dan perempuan sebesar 12,3%, dengan penyebaran di perkotaan sebesar 4,9% dan dipedesaan 12,2%.

Bahkan, berdasarkan data Departemen Pendidikan Nasional, hingga akhir tahun 2006, masih 12,88 juta penduduk Indonesia, tersebar di pedesaan dan

²² Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 Bab VI, hal 72

²³ Ibid Bab II, hal 7-10

Dikson Silitonga : "*Aspek-Aspek Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya.....*" 73

perkotaan, yang buta aksara. Kondisi ini memang sedikit lebih baik dibandingkan kondisi di tahun 2005 yang sebanyak 14.595.088 orang. Walaupun demikian, masih belum mampu mengeluarkan Indonesia dari kelompok negara-negara (ada 34 negara) di dunia yang jumlah penduduk buta aksaranya di atas 10 juta orang. Tingginya angka buta aksara inilah yang memberi andil menempatkan peringkat IPM Indonesia di posisi bawah. Dua per tiga dari total penilaian atas kriteria pendidikan didasarkan pada jumlah penduduk di atas 15 tahun yang buta aksara. Artinya, jika angka buta aksaranya masih tinggi maka nilai atas pendidikan jadi rendah.²⁴

Kesulitan dalam upaya pemberantasan buta aksara di Indonesia disebabkan oleh kenyataan bila masih sangat banyak anak yang putus sekolah bahkan tidak sekolah. Disamping itu, minimnya anggaran juga disinyalir menjadi penyebab terhambatnya memberantas buta aksara. Pada tahun 2006 lalu pemerintah hanya menanggarkan dana Rp. 175 miliar, padahal dibutuhkan sedikitnya Rp. 450 miliar untuk menekan angka buta aksara. Kondisi ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat terhadap pendidikan yang masih sangat rendah seiring dengan kecilnya alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2007, yakni hanya 11,8 persen.²⁵ Memang pemerintah kita selalu menganjurkan agar mereka mau masuk sekolah. Sayangnya, anjuran itu kurang disertai dengan penyediaan fasilitas yang memadai, baik dari sisi jumlah maupun mutu.

Soal peran dan posisi guru juga demikian halnya. Kabarnya pemerintah di negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Brunei, Taiwan, Jepang, Vietnam, Singapura, dan sebagainya, sangat menghargai peran guru dan memosisikannya sebagai pribadi yang sangat dihormati dan disegani. Sebab, mereka tidak segan-segan menggaji guru dengan nilai yang tinggi. Lalu bagaimana dengan guru di Indonesia? Apakah para guru kita dapat hidup dengan layak dan menabung dengan mengandalkan gajinya? Apakah peran dan posisi para guru terandalkan di masyarakat luas? Tentunya kita semua sangat paham dengan kondisi yang senyatanya.

²⁴ Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 Bab VI, hal lampiran

²⁵ Internet

Dikson Silitonga : "*Aspek-Aspek Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya.....*" 74

Ironisnya, Indonesia termasuk salah satu negara yang jumlah guru berpendidikan primer setara S1 yang kurang dari 50 persen. Ini berarti dari jumlah 2,7 juta guru, sebanyak 1,35 juta orang guru belum mencapai kualifikasi S1. Laporan Diknas tahun 2006 menjelaskan bahwa guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, baru mencapai target 35,6% saja. Jadi, sebanyak 64,4% guru belum memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Sedangkan, dosen yang memenuhi kualifikasi S2/S3 baru mencapai 54,02%. Jadi, masih ada sebanyak 45,08 % dosen yang belum memenuhi kualifikasi S2/S3. Pada tahun 2007, depdiknas baru berhasil meningkatkan kualifikasi guru hingga S1/D4 sebanyak 81.800 guru dan melakukan sertifikasi guru sebanyak 147.217 orang.²⁶

Padahal, dalam konteks pembangunan sektor pendidikan, guru merupakan pemegang peran yang amat sentral. Guru adalah jantungnya pendidikan. Tanpa denyut dan peran aktif guru, kebijakan pembaruan pendidikan secanggih apa pun tetap akan sia-sia. Sebagus apa pun dan semodern apa pun sebuah kurikulum dan perencanaan strategis pendidikan dirancang, jika tanpa guru yang berkualitas, maka tidak ada gunanya. Artinya, pendidikan yang baik dan unggul tetap akan tergantung pada kondisi mutu guru.

Terkait hal ini, **UNESCO** dalam laporan *The International Commission on Education for Twenty-first Century (Jacques Delors, 1998)*. Menegaskan bahwa "memperbaiki mutu pendidikan pertama-tama tergantung perbaikan perekrutan, pelatihan, status sosial, dan kondisi kerja para guru; mereka membutuhkan pengetahuan dan keterampilan, karakter personal, prospek profesional, dan motivasi yang tepat jika ingin memenuhi ekspektasi stakeholder pendidikan"²⁷ (Karena itu, upaya meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan para guru adalah suatu keniscayaan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24/PUU-V/2007 yang memutuskan bahwa gaji guru masuk dalam anggaran pendidikan 20 persen, tidak boleh menjadi hambatan.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah seberapa serius pemerintah menghormati dan menjunjung tinggi profesi guru yang telah banyak berperan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta mencerdaskan

²⁶ Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014, lampiran

²⁷ Jacques Delors, Diterjemahkan W.P Napitupulu, *Pendidikan Untuk Abad XXI*, UNESCO Publishing, 1998

Dikson Silitonga : "Aspek-Aspek Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya....." 75

kehidupan bangsa? Apa yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan mutu profesi guru sebagai pendidik? Lalu bagaimana dengan kesejahteraan dan nasib masa depan guru ditengah tuntutan dan himpitan ekonomi saat ini?

Terlepas dari masih banyaknya persoalan kebangsaan yang menjerat kita, dalam konteks pembangunan sektor pendidikan, komitmen serius untuk terus meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru merupakan suatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, jika kita mau betul-betul serius ingin membangun bangsa ini menjadi lebih beradab. Sebab, guru yang bermutu dan sejahtera memegang peran amat sentral dalam proses pendidikan.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pada program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan tahun 2008 untuk kegiatan sertifikasi pendidik bagi sekitar 200.000 orang guru, peningkatan kualifikasi akadeik guru ke S1/D4 sebanyak 270.000 guru, peningkatan kompetensi guru Dikdas sebanyak 3.049 guru, dan peningkatan kompetensi guru Dikmen sebanyak 12.828 guru.²⁸

Adanya komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru bisa dijadikan sebagai momentum pembangkit kembali idealisme guru dalam membangun peradaban bangsa Indonesia. Sehingga, masa depan Indonesia bisa lebih maju, berkualitas, berbudaya, cerdas, dan dapat bersaing dalam percaturan dunia. Namun, persoalannya adalah bagaimana agenda tersebut dapat diimplementasikan dan diwujudkan secara nyata, konkret, dan didasarkan atas kemauan politik dan keseriusan tekad pemerintah.

3. Otonomi Daerah Dan Pendidikan Nasional

Di dalam Ayat (2), (5) dan (6) Pasal 18 UUD Negara RI 1945 diatur wewenang pemerintah daerah sebagai daerah otonom. Dalam Ayat (2) disebutkan bahwa, "Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan/" Kemudian dalam Ayat (5) disebutkan bahwa, "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah". Sedangkan di

²⁸ Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014, lampiran
Dikson Silitonga : "Aspek-Aspek Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya....." 76

dalam Ayat (6) disebutkan bahwa, "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".²⁹ Tegasnya, pasal ini secara jelas memberikan amanat seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan memajukan daerahnya dalam semua bidang, termasuk pendidikan, sesuai undang-undang yang berlaku.

Terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan, pengaturannya dimuat dalam Pasal 50 Ayat (2) dan (5) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Dalam Ayat (2) disebutkan, "Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional", dan dalam Ayat (5) disebutkan, "Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal".³⁰

Menurut **Soedijarto**, berangkat dari ketentuan UU Sisdiknas jelaslah bahwa pemerintah daerah, sebagai bagian dari sistem pendidikan penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertanggung jawab untuk mengelola pendidikan yang bermutu sesuai dengan standard nasional yang digariskan oleh pemerintah pusat. Untuk itu tidak ada pilihan kecuali berupaya agar standar nasional dalam hal: (1) kualitas dan kualifikasi tenaga guru dan kependidikan lainnya; (2) sarana dan prasarana; (3) kurikulum dan proses pembelajaran (4) media pembelajaran seperti buku, laboratorium, dan media pembelajaran lain yang diperlukan dan (5) sistem evaluasi yang komprehensif, terus-menerus, dan objektif dipenuhi persyaratannya.³¹

Untuk memenuhi kelima unsur strategis di atas, diperlukan dukungan dana yang cukup. Permasalahannya adalah setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda-beda, sehingga pemenuhan kelima unsur tersebut pasti akan berbeda. Perbedaan pemenuhan kelima unsur strategis tersebut akan berdampak pula pada disparitas pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu di setiap

²⁹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, hal 16

³¹ Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Penerbit: PT. Kompas Media Nusantara, 2008, hal 291

daerah. Misalnya, pendapatan 20 persen APBD Kalimantan Timur tidak sama dengan 20 persen APBD NTT. Hal ini berarti, pemenuhan layanan pendidikan bermutu pasti lebih tinggi di Kalimantan Timur akan lebih tinggi dibanding NTT, karena memang APBD Kalimantan Timur lebih besar dari APBD NTT.

Atas dasar ini, menurut **Soedijarto**, pemerintah pusat harus memiliki peta yang jelas tentang disparitas tersebut dan mengupayakan pemberian subsidi yang bervariasi untuk daerah yang berbeda kemampuannya. Bila tidak, otonomi daerah akan memperparah disparitas mutu pelayanan pendidikan antar daerah. Sebagai negara kesatuan, hal itu tidak seharusnya terjadi.³²

4. Komitmen Politik Untuk Pendidikan

Seperti disebutkan di atas, politik pendidikan di Indonesia masih belum sepenuhnya positif dan solid, bahkan ada yang menyatakan "runyam". Masalahnya sekarang ialah bagaimana upaya yang harus kita lakukan untuk membangun politik pendidikan yang solid dan menjanjikan itu ?

Banyak cara dapat dilakukan untuk membangun politik pendidikan di suatu negara; namun keseluruhan cara itu umumnya berawal dari komitmen para penentu politik pendidikan itu sendiri, yang dalam hal ini antara lain ialah para elite politik, pejabat pemerintah serta para pengambil kebijakan negara. Mereka semua harus diketuk hatinya supaya memiliki komitmen yang memadai sehingga dapat bersikap "sadar didik" (*sense of education*). Artinya, menyadari pentingnya pendidikan untuk membangun manusia dan bangsanya. Tanpa pendidikan (yang baik) tidaklah mungkin suatu bangsa dapat berkembang secara konstruktif dinamis.

Komitmen seperti itulah yang belum dimiliki oleh kebanyakan elite politik, pejabat pemerintah, serta para pengambil kebijakan pemerintahan lainnya di negara kita pada umumnya. Para "petinggi" negara kita sampai hari ini masih lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat jangka pendek dari pada jangka panjang. Mereka umumnya lebih senang membuat keputusan-keputusan politik untuk kepentingan hari ini dari pada kepentingan hari esok. Mereka tampaknya

³² Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Penerbit: PT. Kompas Media Nusantara, 2008, hal 292

lebih asyik bercengkerama dengan kepastian sekelompok orang yang ada sekarang dari pada nasib bangsa seperempat atau setengah abad yang akan datang. Mereka harus disadarkan bahwa nasib bangsa kita sepuluh, dua puluh, dan tiga puluh tahun lagi sangat ditentukan bagaimana kita mengelola pendidikan hari ini. Hal itu berarti, kalau kita membuat kekeliruan dalam mengelola pendidikan di hari ini maka akibatnya akan dirasakan oleh anak cucu kita di masa yang akan datang.

Di samping itu, dari kalangan pendidik juga harus ada kesadaran untuk bisa menyelami dunia politik. Maksudnya, masyarakat pendidikan harus aktif mempengaruhi para pengambil keputusan di bidang pendidikan. Dengan begitu, kaum pendidik tidak lagi terkungkung dalam dunianya, melainkan memiliki ruang gerak yang lebih leluasa dan signifikan. Jangan sampai ada apriori berlebihan yang menganggap politik itu selalu bermuka dua dan berkubang kemunafikan, sehingga dengan mempolitikkan pendidikan berarti melakukan perbuatan tercela.

Paling tidak, kaum pendidik harus berani memberikan pencerahan kepada para politisi bahwasanya pendidikan itu bersifat antisipatoris dan prepatoris, yaitu selalu mengacu ke masa depan dan selalu mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi kehidupan mendatang. Kalau kemudian ada kesan bahwa pendidikan tak dapat berbuat apa-apa saat ini, maka asumsi tersebut harus dirubah. Ke depan, pendidikan harus punya andil yang lebih besar dalam membentuk tata kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan kemajuan peradaban bangsa.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 1 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003).³³ Bahkan, dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas ditegaskan bahwa, "pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, hal 1

Dikson Silitonga : "Aspek-Aspek Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya....." 79

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".³⁴

Dengan demikian, jelaslah bahwa pendidikan bisa dijadikan sebagai sarana membangun kehidupan sosial politik dan peradaban bangsa yang unggul. Karena, manusia-manusia yang lahir dari rahim pendidikan adalah manusia-manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, berimanan, berakhlak mulia, memiliki kompetensi dan profesionalitas serta sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Keberanian kaum pendidik meluruskan arah pemikiran politisi tentang pendidikan sudah barang tentu merupakan terobosan besar, yang pada saatnya nanti diharapkan akan mampu melahirkan suatu budaya politik baru, budaya politik yang akan mendorong pelaku politik kita bertindak jujur dan cerdas, adil dan anti korupsi, atau paling tidak bersedia meredusir unsur-unsur hedonistis dan mengoptimalkan watak humanistik-patriotik.

Komitmen dan kesadaran seperti itulah yang harus kita tumbuh kembangkan secara bersama untuk membangun politik pendidikan yang solid dan menjanjikan. Tanpa adanya politik pendidikan yang solid kita tidak akan mampu menjadi bangsa yang besar.

B. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara. Negara yang politik pendidikannya buruk, kinerja pendidikannya pun juga buruk. Sebaliknya, negara yang politik pendidikannya bagus, kinerja pendidikannya pun juga bagus. *Karena itu, dibutuhkan upaya serius untuk menciptakan kondisi politik pendidikan yang*

³⁴ Ibid, hal 3

Dikson Silitonga : "Aspek-Aspek Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya....." 80

sehat dan solid sehingga tercipta pendidikan yang berkualitas dan merata disetiap wilayah.

- 2) Banyaknya kasus unjuk rasa yang dilakukan guru adalah indikasi bahwa pelaksanaan politik demokrasi di Indonesia belum mantap, hal ini disebabkan belum membudayanya nilai-nilai politik demokrasi dalam masyarakat. Karena itu, *dibutuhkan kesadaran pemerintah untuk melaksanakan ketentuan konstitusi*, khususnya tentang anggaran pendidikan. Dengan demikian penciptaan *pendidikan berkualitas sebagai alat pembudaya nilai-nilai politik demokrasi* akan tercapai.

2. Rekomendasi

- 1) Untuk memajukan dunia pendidikan nasional dan meningkatkan kualitas SDM bangsa sesuai dengan yang dicita-citakan, maka pemenuhan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD adalah menjadi keniscayaan, Karena itu, *dibutuhkan komitmen dan kesadaran pemerintah* sebagai lembaga *legitimate* pembuat kebijakan dan penyelenggara pendidikan.
- 2) Mengingat kemampuan keuangan setiap daerah berbeda, maka *pemerintah pusat harus memiliki peta yang jelas tentang disparitas tersebut dan mengupayakan pemberian subsidi yang bervariasi untuk daerah yang berbeda kemampuannya*. Bila tidak, otonomi daerah akan memperparah disparitas mutu pelayanan pendidikan antar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Almond. Gabriel A. and Verba, Syney. *Civil, Culture : Political Attitude and Democracy in Five Nation*, Boston Little Brown and Co.1965.

Azra, Azyumardi, 2002, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Penerbit: Kompas, Jakarta.

Dahl, Robert A. *On Democracy*. New Haven & London : Yale University Press,
1998

Delors, Jacques. Diterjemahkan W.P Napitupulu. *Pendidikan Untuk Abad XXI*,
UNESCO Publishing, 1998

Lippset, Seymour Marten. *Political Man : The Social Bases of Politics*, Garden
City, New York : Anchor Books Doubleday & Company Inc., 1960

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014

Soedijarto. *Landasan dan Arah Pendidikan nasional Kita*. Jakarta : Kompas,,
2008

Sugiyono, 1999, "**Metode Penelitian Administrasi**", Penerbit : Alfabeta,
Bandung, Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem
Pendidikan Nasional*

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.